

**THE INFLUENCE OF REGIONAL OWN REVENUE (PAD)
TO POVERTY AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI)
IN AUTONOMY REGION ERA
(Case Study in East Java Province)**

Ayu Chandra Dewi, M. Khoiru Rusydi, M.Ak., Ak., BKP

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email: AyuChandraDewi23@gmail.com

Abstrak

Indonesia yang terbagi atas provinsi-provinsi dan daerah provinsi terdiri dari kabupaten dan kota yang menggunakan sistem otonomi daerah untuk mewujudkan pembangunan nasionalnya. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai pemberian hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan otonomi daerah itu sendiri adalah untuk menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat terutama kesehatan dan pendidikan, serta menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran. Apabila lapangan kerja tercipta maka akan mengurangi pengangguran di daerah tersebut dan akan mengurangi kemiskinan dan akan mempengaruhi indeks pembangunan manusianya juga. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dan dampaknya terhadap kemiskinan dan perubahan indeks pembangunan manusianya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap penurunan kemiskinan dan perubahan Indeks pembangunan Manusia di Provinsi Jawa timur. Dengan metode analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

PENDAHULUAN

Sekarang ini negara Indonesia sedang berupaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan dan juga merencanakan pembangunan yang disebut dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan nasional dimulai dari pembangunan pondasi ekonomi yang kuat di daerah atau pembangunan ekonomi dari pembangunan ekonomi negara sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi menurut (Mudrajat, 2004 dalam Anis, 2007) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah pemerintah mempunyai tanggung jawab ekonomi yaitu: (1) Menyediakan pelayanan publik dasar kepada masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar, (2).Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan pemahaman pada investor dan ekspor, (3). Menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran, terutama tenaga kerja lokal tanpa harus menciptakan hambatan terhadap tenaga kerja daerah lain, (4). Memperbaiki pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan fokus pada UMKM lokal, (5). Ikut mengendalikan inflasi lokal, dari sisi non moneter terutama logistic dan distribusi

Provinsi Jawa timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota ini terus meningkatkan sumber-sumber penerimaannya untuk menuju kemandirian daerah. 4 komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah dan hanya pajak daerah yang menyumbang secara signifikan sedangkan

lain-lain belum berperan secara optimal. Dan diharapkan dari penerimaan pajak yang tahun menahun mengalami kenaikan nantinya akan membentuk suatu struktur PAD yang kuat dan menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mendukung kemandirian fiskal provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Putri Ani, 2013) bahwa semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah maka akan semakin menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan menggali potensi-potensi dan penggunaan potensi yang tepat karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tanpa pengembangan pembangunan dan pendapat daerah tidak akan tercapai hasil yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber kehidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Suparmoko, 2002).

Menurut (Pambudi, 2008) diketahui bahwa variabel pajak, retribusi dan bagi hasil milik daerah memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat. Untuk itu meningkatkan IPM tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusianya, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Otonomi Daerah

Pengertian dari otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Suwandi (2005), filosofi dari otonomi daerah adalah:

1. Eksistensi pemerintah daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis,
2. Setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi,
3. Kesejahteraan dicapai melalui pelayanan public
4. Pelayanan public dapat bersifat pelayanan dasar maupun bersifat pengembangan sektor unggulan.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing, ini merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Kaloh (2002) bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi rakyat daerah bukan otonomi daerah dalam pengertian wilayah tertentu di tingkat lokal.

Menurut undang-undang No. 32 tahun 2004, prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- Asas Desentralisasi: penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan republik Indonesia.
- Asas Dekonsentrasi: Pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepala instansi vertical di wilayah tertentu untuk mengurus urusan pemerintahan.
- Asas Tugas Pembantuan: Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu disertai pendanaan dan dalam hal tertentu disertai sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melapor pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Tujuan Otonomi Daerah adalah:

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik
2. Pengembangan kehidupan demokrasi
3. Keadilan nasional
4. Pemerataan wilayah daerah
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Republik Indonesia.
6. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2. Desentralisasi Fiskal

Pengertian desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima tranfer dari pemerintahan yang lebih tinggi dan menentukan belanja rutin dan investasi. Kebaikan desentralisasi diikuti dengan peningkatan mobilitas sumber-sumber dan pengurangan tekanan atas keuangan pusat, peningkatan akuntabilitas dan peningkatan ketanggapan dan tanggung jawab secara umum maka desentralisasi merupakan sesuatu yang berharga.

Tujuan awal dilakukannya desentralisasi fiskal adalah mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar daerah, selain itu juga diharapkan meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Menurut Bahl (1999) desentralisasi fiskal diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (taxing power).

Menurut Bird and vaillancourt (2000), ada dua persyaratan penting untuk kesuksesan desentralisasi fiskal, terlepas dari keseimbangan makro atau efesiensi mikro yaitu:

1. proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus transparan dan pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut.
2. Rencana kebijakan biaya-biaya dari keputusan yang diambil harus lebih sesuai dan sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat setempat.

3. Pengertian Daerah dan Keuangan Daerah

a) Daerah

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah:

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka anggaran, pendapatan dan belanja daerah (APBD).

c) **Penerimaan Daerah**

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah yang terdiri atas pendapatan dan pembiayaan.

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

1. **Pendapatan Asli Daerah**
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi daerah,
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

4. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-undang no. 28 Tahun 2009 pengertian Penerimaan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang No 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah.

Untuk mengetahui potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan (Simanjuntak, 2001):

- Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah menentukan kemampuan masyarakatnya dalam membayar

segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Seperti masyarakat industri akan lebih tinggi membayar pungutan pemerintah daripada masyarakat agraris. Serta adanya pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu juga mempengaruhi.

- Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Ini adalah upaya memperluas cakupan penerimaan dan pendapatan.
- Pertumbuhan penduduk,
- Tingkat inflasi
- Perkembangan PDRB per kapita rill
- Pembangunan baru
- Penyesuaian tarif
- Sumber pendapatan baru
- Perubahan Peraturan.

b. **Dana Perimbangan**

Adalah salah satu penumbuh pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah.

- **Dana Bagi hasil**

Dalam UU no. 33 Tahun 2004 pasal 10 bahwa dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, terdiri atas:

 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus

Adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud kebutuhan khusus adalah:

- Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, artinya adalah kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain.
- Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. (Republika Indonesia, 2004b).

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah bersumber dari:

- Pemerintah
- Pemerintah daerah;
- Lembaga keuangan bank;
- Lembaga keuangan bukan bank;
- Masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Dana darurat berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan APBD.

5. Kemandirian Fiskal

Menurut Ladjin (2008), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal adalah

1. Kemampuan keuangan daerah mampu melaksanakan otonomi daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

6. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. (Berita resmi BPS Prov. Jawa Timur, juli 2012). Kemiskinan masih menjadi masalah besar bagi pemerintahan Indonesia, kemiskinan bisa disebabkan oleh kelangkaan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

7. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia diartikan sebagai cara ukur untuk mencapai pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu, angka harapan hidup, angka melek huruf, kemampuan daya beli, pendapatan per kapita.

8. Hipotesis

Mengacu pada landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis sebagai berikut:

H₁ : PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan

H₂ : PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Indek Pembangunan Manusia (IPM)

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. (Indrianto dan Supomo, 2011:12)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dapat diukur dengan skala numerik (angka) yang digunakan peneliti untuk

menghitung kemiskinan dan IPM. sederhana. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier sederhana

Data dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk time series, dari tahun 2008 sampai 2012, dan data cross section yang terdiri dari 38 kabupaten/kota. Pengumpulan data dilakukan melalui perpustakaan yang berupa referensi statistik, jurnal, buku, dokumen, literatur-literatur yang mendukung.

Definisi Operasional

1. Pendapatan Asli Daerah (X)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Kemiskinan (Y_1)

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Timur terletak pada 111°0' hingga 144°4' Bujur Timur, dan 7°12' hingga 8°48' Lintang Selatan. Luas wilayah Jawa Timur mencapai 46.428 kilometer persegi, terbagi dalam empat badan koordinasi wilayah (Bakorwil), 29 kabupaten, 9 kota, dan 658 kecamatan dengan 8.457 desa/kelurahan (2.400 kelurahan dan 6.097 desa). Jawa timur sebelah utara berbatasan dengan Kepulauan Madura yang sekitar 10% dari luas wilayah Jawa Timur. Disebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah.

1. Kondisi Makro Ekonomi

Jawa timur merupakan barometer perekonomian nasional setelah DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Barat, sebab kontribusi PDRB Jawa Timur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional mencapai 16%. Perekonomian Jawa Timur ditopang tiga sektor utama, yaitu perdagangan, industri, dan pertanian.

2. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan dipahami tidak hanya sebatas masalah kemampuan ekonomi, tapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk bisa menjalankan kehidupan secara bermartabat. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tersebar terkonsentrasi di wilayah pulau Madura. Kabupaten Sampang memiliki penduduk miskin terbesar yaitu 46,11% dari jumlah penduduknya.

3. Pendapatan Asli Daerah

PAD provinsi Jawa Timur memperoleh pendapatan secara berturut-turut pada tahun 2008-2012 yang ada di dalam laporan APBD provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2008 penerimaan PAD tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar 642.77 sedangkan PAD terendah adalah Kota Mojokerto. Pada tahun 2012 penerimaan PAD tertinggi masih Kota Surabaya sebesar 2.353.325 sedangkan PAD terendah adalah Kota Batu sebesar 42.49. (dapat dilihat di lampiran table 1)

4. Kemiskinan

Pada tahun 2008 kemiskinan terbanyak terdapat pada kabupaten sampang sebesar 43.53 sedangkan kemiskinan terkecil terdapat pada Kota Batu sebesar 6.18. pada tahun 2012 kemiskinan terbanyak masih terdapat pada Kabupaten Sampang sebesar 27.87 dan kemiskinan terkecil juga masih terdapat pada Kota Batu sebesar 4.45. (dapat dilihat di lampiran table 2)

5. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Data IPM secara berturut-turut pada tahun 2008-2012 yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. Pada tahun 2008 IPM terbesar terdapat pada Kota Surabaya sebesar 76.36 sedangkan IPM terkecil terdapat pada Kabupaten Sampang sebesar 57.66. pada tahun 2012 IPM terbanyak terdapat pada Kota Malang sebesar 78.43 dan IPM terkecil masih terdapat pada Kabupaten Sampang sebesar 61.67. (dapat dilihat pada lampiran table 3).

Berdasarkan penelitian diatas dihasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan maupun Indek Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut dapat diketahui dari besarnya nilai probabilitas dari masing-masing persamaan regresi linear sederhana. Untuk persamaan pertama yaitu pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan mempunyai probabilitas sebesar 0,062 yang lebih besar dari 0,05.

TABEL 4.1
THE VALUE OF R² APPLICATION PAD ON POVERTY
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.306 ^a	.094	.069	6.14210

a. Predictors: (Constant), revenue

b. Dependent Variable: Poverty

Dari hasil analisis penelitian ini diketahui besarnya kontribusi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan adalah $R^2 = 0,094$ atau 9,4% hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang terjadi pada kemiskinan yang dipengaruhi oleh PAD sebesar 9,4%, sedangkan sisanya sebesar 90,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain yang tidak dicakup dalam model analisis ini.

Untuk persamaan kedua yaitu pengaruh penerapan pendapatan asli daerah terhadap IPM mempunyai probabilitas sebesar 0,059 yang lebih besar dari 0,05.

TABEL 4.2
THE VALUE R² APPLICATION PAD ON HDI
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.309 ^a	.096	.070	4.50136

a. Predictors: (Constant), Revenue

b. Dependent Variable: HDI

Dari hasil penelitian ini juga diketahui besarnya kontribusi pengaruh PAD terhadap IPM adalah $R^2 = 0,096$ atau 9,6%, hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada IPM dipengaruhi PAD sebesar 9,6%, sedangkan sisanya sebesar 90,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model analisis ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji t dapat disebutkan bahwa besarnya probabilitas 0.062 lebih dari 0,05 dengan demikian dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan, sehingga hipotesa pertama yang menyatakan bahwa "PAD berpengaruh terhadap kemiskinan" tidak dapat didukung kebenarannya

Berdasarkan hasil t dapat disebutkan bahwa besarnya probabilitas 0,059 lebih dari 0,05, dengan demikian dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga hipotesa kedua yang menyatakan bahwa "PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)" tidak didukung kebenarannya.

UCAPAN TRIMAKASIH

Peneliti menyampaikan trimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Mohammad Bisri MS.
- Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Prof. Candra Fajri Ananda SE., MSc., Ph.D
- Kepada bapak pembimbing M. Khoiru Rusydi, M.Ak., Ak., BKP
- Seluruh keluarga tercinta

DAFTAR PUSTAKA

- BADAN PUSAT STATISTIK, 2014. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional, 1996-2013. <http://www.bps.go.id>. Diakses pada 25 oktober 2014.
- BADAN PUSAT STATISTIK, 2014. Kemiskinan, 2012. <http://www.bps.go.id>. Diakses pada 25 oktober 2014.
- BIRD, RICHARD and VAILLANCOURT, FRANCOIS, 2000. Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang, Cetakan 1, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. (Terjemahan).
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2008. LGF Realisasi. <http://www.dpjk.depkeu.go.id/> diakses pada 24 oktober 2014
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2009. LGF Realisasi. <http://www.dpjk.depkeu.go.id/> diakses pada 24 oktober 2014.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2010. LGF Realisasi. <http://www.dpjk.depkeu.go.id/> diakses pada 24 oktober 2014.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2011. LGF Realisasi. <http://www.dpjk.depkeu.go.id/> diakses pada 24 oktober 2014.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2012. LGF Realisasi. <http://www.dpjk.depkeu.go.id/> diakses pada 24 oktober 2014.
- KUNCORO, MUDRAJAT. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.

SETYAWATI, ANISA. “analisis pengaruh PAD, DAU, DAK dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran: pendekatan analisis jalur” dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Desember 2007, Vol 4, No. 2, Hal 211-228

SUPARMOKO. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Edisi Pertama. Andi, Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

LAMPIRAN

Tabel 1
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2008-2012 (Ribu Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pacitan	20.87	26.22	25.22	34.38	45.00
2.	Ponorogo	33.39	41.58	49.78	52.71	77.38
3.	Trenggalek	26.69	34.25	50.62	61.07	67.28
4.	Tulungagung	45.21	55.66	70.96	86.40	110.50
5.	Blitar	43.59	51.04	40.84	66.52	77.04
6.	Kediri	54.61	50.68	77.67	59.64	83.05
7.	Malang	85.62	103.39	101.52	126.03	154.26
8.	Lumajang	50.00	58.08	66.05	76.10	87.05
9.	Jember	91.92	108.81	146.45	180.27	211.62
10.	Banyuwangi	53.81	63.01	78.15	91.31	119.66
11.	Bondowoso	31.06	30.36	46.48	50.56	57.78
12.	Situbondo	21.99	32.02	36.44	50.80	57.03
13.	Probolinggo	32.49	36.11	37.29	56.62	70.91
14.	Pasuruan	60.92	72.30	87.69	125.43	152.01
15.	Sidoarjo	187.47	252.59	288.73	393.78	597.76
16.	Mojokerto	40.50	50.33	62.87	78.83	107.07
17.	Jombang	63.92	79.56	100.57	105.05	117.51
18.	Nganjuk	48.30	61.38	71.85	84.52	98.69
19.	Madiun	26.27	32.75	35.96	49.80	57.70
20.	Magetan	34.56	38.25	45.00	55.26	61.16
21.	Ngawi	20.07	19.23	26.56	35.31	51.64
22.	Bojonegoro	48.90	59.08	73.20	93.16	135.70
23.	Tuban	66.62	75.55	73.74	92.13	119.90
24.	Lamongan	54.56	66.16	94.07	103.34	108.61
25.	Gresik	126.92	135.68	160.96	231.70	325.32

26.	Bangkalan	30.38	32.24	35.36	44.02	62.84
27.	Sampang	20.21	30.46	35.12	40.51	52.29
28.	Pamekasan	27.56	33.43	38.15	45.69	56.16
29.	Sumenep	38.21	38.33	37.94	47.39	69.79
30.	Kota Kediri	66.05	73.45	77.67	88.28	101.47
31.	Kota Blitar	28.69	32.80	40.84	49.12	54.99
32.	Kota Malang	78.11	86.50	101.52	158.45	175.99
33.	Kota Probolinggo	30.25	36.09	40.07	56.62	60.45
34.	Kota Pasuruan	18.49	25.62	34.61	30.53	33.21
35.	Kota Mojokerto	17.46	21.08	40.07	34.63	48.06
36.	Kota Madiun	18.51	23.41	28.15	38.04	46.55
37.	Kota Surabaya	642.77	864.08	1.036.1	2.139.	2.353.
38.	Kota Batu	18.10	22.58	30.00	30.00	31.49

Sumber: DJPK tahun 2008-2012

Tabel 2
DATA KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA
TIMUR TAHUN 2008-2012

No.	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pacitan	21.17	19.01	19.50	18.13	17.22
2.	Ponorogo	16.62	14.63	13.22	12.29	11.72
3.	Trenggalek	20.64	18.27	16.00	14.90	14.15
4.	Tulungagung	12.41	10.60	10.64	9.90	9.37
5.	Blitar	14.53	13.19	12.13	11.29	10.70
6.	Kediri	18.85	17.05	15.52	14.44	13.66
7.	Malang	15.08	13.57	12.54	11.67	11.00
8.	Lumajang	18.17	15.83	13.98	13.01	12.36
9.	Jember	17.74	15.43	13.27	12.44	11.76
10.	Banyuwangi	13.91	12.16	11.25	10.47	9.93

11.	Bondowoso	22.23	20.18	17.89	16.66	15.75
12.	Situbondo	18.02	15.99	16.23	15.11	14.29
13.	Probolinggo	30.13	27.69	25.22	23.48	22.14
14.	Pasuruan	18.04	15.58	13.18	12.26	11.53
15.	Sidoarjo	8.35	6.91	7.45	6.97	6.42
16.	Mojokerto	14.61	13.24	12.23	11.38	10.67
17.	Jombang	16.46	14.46	13.84	12.88	12.18
18.	Nganjuk	19.77	17.22	14.91	13.88	13.17
19.	Madiun	18.5	16.97	15.45	14.37	13.65
20.	Magetan	15.67	13.97	12.94	12.01	11.45
21.	Ngawi	20.86	19.01	18.26	16.74	15.94
22.	Bojonegoro	23.87	21.27	18.78	17.47	16.60
23.	Tuban	25.84	23.01	20.19	18.78	17.77
24.	Lamongan	22.51	20.47	18.70	17.41	16.64
25.	Gresik	21.43	19.14	16.42	15.33	14.29
26.	Bangkalan	32.7	30.45	28.12	26.22	24.61
27.	Sampang	34.53	31.94	32.47	30.21	27.87
28.	Pamekasan	26.32	24.32	22.47	20.94	19.53
29.	Sumenep	29.46	26.89	24.61	23.10	21.87
30.	Kota Kediri	11.71	10.41	9.31	8.63	8.11
31.	Kota Blitar	9.34	7.56	7.63	7.12	6.72
32.	Kota Malang	7.22	5.58	5.90	5.50	5.19
33.	Kota Probolinggo	23.29	21.06	19.03	17.74	18.33
34.	Kota Pasuruan	11.2	9.34	9.00	8.39	7.87
35.	Kota Mojokerto	8.88	7.19	7.41	6.89	6.46
36.	Kota Madiun	6.69	5.93	6.11	5.66	5.35
37.	Kota Surabaya	8.23	6.72	7.07	6.58	6.23
38.	Kota Batu	6.18	4.81	5.08	4.74	4.45

Sumber: BPS, 2012

Tabel 3
INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA
PROVISNI JAWA TIMUR TAHUN 2008-2012 (Ribuan)

No.	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pacitan	70.91	71.45	72.07	72.07	72.88
2.	Ponorogo	69.07	69.75	70.29	71.15	71.91
3.	Trenggalek	72.15	72.72	73.24	73.66	74.09
4.	Tulungagung	72.45	72.93	73.34	73.76	74.45
5.	Blitar	72.74	73.22	73.67	74.06	74.43
6.	Kediri	70.85	71.33	71.75	72.28	72.72
7.	Malang	69.55	70.09	70.54	71.17	71.94
8.	Lumajang	66.65	67.26	67.82	68.55	69
9.	Jember	63.71	64.33	64.95	65.53	65.99
10.	Banyuwangi	67.8	68.36	68.89	69.58	70.53
11.	Bondowoso	61.26	62.11	62.94	63.81	64.98
12.	Situbondo	63.06	63.69	64.26	64.67	65.06
13.	Probolinggo	61.44	62.13	62.99	63.84	64.35
14.	Pasuruan	66.02	66.84	67.61	68.24	69.17
15.	Sidoarjo	75.35	75.88	76.35	76.9	77.36
16.	Mojokerto	72.51	72.93	73.39	73.89	74.42
17.	Jombang	71.85	72.33	72.7	73.14	73.86
18.	Nganjuk	69.73	70.27	70.76	71.48	71.96
19.	Madiun	68.63	69.28	70.18	70.5	70.88
20.	Magetan	71.79	72.32	72.72	73.17	73.85
21.	Ngawi	68.02	68.41	68.82	69.73	70.2
22.	Bojonegoro	65.83	66.38	66.92	67.32	67.74
23.	Tuban	67.02	67.68	68.31	68.71	69.18
24.	Lamongan	68.33	69.03	69.63	70.52	71.05

25.	Gresik	73.49	73.98	74.47	75.17	75.97
26.	Bangkalan	63.4	64	64.51	65.01	65.69
27.	Sampang	57.66	58.68	59.7	60.78	61.67
28.	Pamekasan	63.13	63.81	64.6	65.48	66.51
29.	Sumenep	64.24	64.82	65.6	66.01	66.41
30.	Kota Kediri	75.11	75.68	78.28	76.79	66.41
31.	Kota Blitar	76.6	76.98	77.42	77.89	78.31
32.	Kota Malang	76.19	76.69	77.2	77.76	78.43
33.	Kota Probolinggo	73.29	73.73	74.33	74.85	75.44
34.	Kota Pasuruan	72.6	73.01	73.45	73.89	74.33
35.	Kota Mojokerto	76.11	76.43	77.02	77.5	78.01
36.	Kota Madiun	75.89	76.23	76.61	77.07	77.5
37.	Kota Surabaya	76.36	76.82	77.28	77.85	78.33
38.	Kota Batu	73.33	73.88	74.45	74.93	75.42

Sumber: BPS, 2012